

Peran Dana Transfer Fiskal dalam Menopang Ketahanan Fiskal Daerah Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Timur

Ceva Yuana Rivera ^{1*}, Angeline Fannesa Febriyana ², Revienda Anita Fitrie ³,
Eva Hany Fanida ⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674246@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana dana transfer fiskal mampu menjaga ketahanan fiskal daerah pascapandemi sebagai dasar perumusan kebijakan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dana transfer fiskal dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pada periode pascapandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/RAPBD) Kabupaten Lombok Timur periode 2022–2024, data transfer dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, serta publikasi Badan Pusat Statistik. Analisis data dilakukan menggunakan rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal, yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai posisi struktural dana transfer dalam pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer secara konsisten menyumbang sekitar 82–86% dari total pendapatan daerah selama periode 2022–2024, sedangkan rasio kemandirian fiskal tetap rendah, yaitu berkisar antara 15–17%, yang dikategorikan sangat rendah berdasarkan standar kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa dana transfer berfungsi sebagai penopang utama stabilitas fiskal di Kabupaten Lombok Timur, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan publik, membiayai program pembangunan, serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi meskipun pendapatan asli daerah masih terbatas. Namun demikian, tingginya tingkat ketergantungan fiskal juga menegaskan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer secara lebih produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur, namun keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang memerlukan penguatan kapasitas pendapatan daerah serta pengurangan ketergantungan struktural terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Keywords: *Transfer Fiskal, Ketahanan Fiskal, Keuangan Daerah, COVID-19, Kabupaten Lombok Timur*

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor kesehatan, sosial, pendidikan, pemerintahan, dan perekonomian. Penyebaran virus yang cepat mendorong pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, seperti *work from home*, pembelajaran jarak jauh, *social distancing*, *physical distancing*, hingga pembatasan sosial berskala besar. Dalam konteks pemerintahan daerah, pandemi COVID-19 menjadi tantangan serius karena pemerintah daerah tetap dituntut

menjalankan pelayanan publik, membiayai kebutuhan pembangunan, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di tengah tekanan fiskal yang cukup besar (OECD, 2020).

Pandemi COVID-19 juga menjadi ujian nyata bagi ketahanan fiskal pemerintah daerah. Ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, penerimaan daerah ikut menurun, terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, kebutuhan belanja daerah justru meningkat untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat (Yassa & Bumbungan, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah semakin bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Dana transfer memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan daerah karena pandemi menyebabkan tekanan pada sisi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (World Bank, 2021).

Fenomena ketergantungan terhadap dana transfer juga terlihat pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur direncanakan sebesar Rp2,895 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440,887 miliar (15,2%), pendapatan transfer sebesar Rp2,429 triliun (83,9%), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,619 miliar. Pada APBD Tahun Anggaran 2024, total pendapatan direncanakan sebesar Rp3,320 triliun, dengan PAD Rp547,940 miliar (16,5%), pendapatan transfer Rp2,732 triliun (82,3%), dan lain-lain Rp40 miliar (Pekab Lombok Timur, 2022; 2023). Perbandingan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun PAD mengalami peningkatan nominal, proporsinya terhadap total pendapatan belum mengalami perubahan signifikan, dan dana transfer tetap mendominasi lebih dari 80% struktur pendapatan daerah.

Dalam sistem desentralisasi fiskal, dana transfer antar pemerintah merupakan instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah (Nanga & Runtuk, 2020). Transfer fiskal juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan agar daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas tetap dapat membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah (Triyulianto & Nurvita, 2024). Dalam kondisi krisis, transfer fiskal menjadi semakin penting karena dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas anggaran, mengurangi tekanan fiskal, dan mempertahankan keberlanjutan pelayanan publik (Ratih et al., 2025). Peran pemerintah pusat melalui transfer fiskal menjadi salah satu mekanisme penting untuk memperkuat ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi guncangan ekonomi (Smoke et al., 2022; Adelia et al., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan pendapatan daerah dan meningkatkan tekanan terhadap keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain menemukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap penerimaan fiskal daerah karena sektor ekonomi mengalami perlambatan sehingga berpengaruh terhadap sumber-sumber pendapatan daerah (Jannah & Khoirunurrofik, 2022). Sementara itu penelitian lain menjelaskan bahwa resiliensi anggaran daerah menjadi faktor penting dalam menghadapi kondisi kritis pasca pandemi karena kapasitas anggaran yang kuat dapat membantu pemerintah daerah menjalankan program strategis dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah (Indriani et al., 2024). Pembiayaan belanja daerah di Indonesia masih memiliki keterkaitan erat dengan transfer fiskal, sehingga fenomena ketergantungan fiskal daerah masih menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Septianingrum et al., 2025; Aini et al., 2026).

Meskipun penelitian mengenai desentralisasi fiskal, dana transfer, dan kinerja keuangan daerah telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan daerah, belanja daerah, atau kemandirian fiskal secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis peran dana transfer fiskal sebagai instrumen penopang ketahanan fiskal daerah pada masa pasca pandemi COVID-19 masih relatif terbatas, terutama pada daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi seperti Kabupaten Lombok Timur. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menempatkan dana transfer sebagai komponen pendapatan daerah, tetapi sebagai instrument strategis dalam menopang ketahanan fiskal daerah pasca pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dana transfer fiskal dalam menopang ketahanan fiskal daerah pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai desentralisasi fiskal, transfer fiskal, dan ketahanan fiskal daerah dalam konteks pemulihan pasca krisis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merancang kebijakan transfer fiskal yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis rasio fiskal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka keuangan daerah, seperti dana transfer fiskal, PAD, dan total pendapatan daerah. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur pendapatan daerah serta menjelaskan peran dana transfer fiskal dalam menopang ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak menggunakan data primer atau survei lapangan, melainkan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen keuangan daerah yang telah dipublikasikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen pengumpulan data berupa lembar dokumentasi yang digunakan untuk mencatat dan mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dari sumber data resmi, meliputi: (1) jumlah dana transfer fiskal (DAU, DAK, DBH); (2) Pendapatan Asli Daerah; dan (3) total pendapatan daerah. Sumber data meliputi dokumen APBD/RAPBD Kabupaten Lombok Timur, data Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, data Badan Pusat Statistik, serta publikasi resmi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) studi dokumentasi, dengan menelusuri dokumen keuangan daerah dan publikasi resmi yang memuat data APBD, PAD, dana transfer, dan total pendapatan daerah; dan (2) studi pustaka, dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, dan referensi lain yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, transfer fiskal, dan ketahanan fiskal daerah.

Teknik Analisis Data dan Penentuan Kategori

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi data pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur, khususnya PAD, dana transfer fiskal, dan

total pendapatan daerah. Kedua, peneliti menghitung dua indikator rasio fiskal utama sebagaimana berikut.

Rasio Kemandirian Fiskal (RKF)

$$RKF = PAD / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD. Kategori penilaian mengacu pada kriteria Mahmudi (2016): Sangat Rendah (<25%), Rendah (25–50%), Sedang (50–75%), dan Tinggi (>75%).

Rasio Ketergantungan Fiskal (RKtF)

$$RKtF = \text{Dana Transfer} / \text{Total Pendapatan Daerah} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan seberapa besar pendapatan daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer pusat. Kategori penilaian mengacu pada standar yang sama dengan RKF secara inversif: Sangat Tinggi (>75%), Tinggi (50–75%), Sedang (25–50%), dan Rendah (<25%).

Ketiga, hasil perhitungan dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan posisi dana transfer fiskal dalam struktur pendapatan daerah. Keempat, hasil analisis diinterpretasikan untuk menjelaskan peran dana transfer fiskal dalam mendukung ketahanan fiskal dan keberlanjutan pelayanan publik daerah pasca pandemi COVID-19. Kelima, hasil divalidasi melalui triangulasi menggunakan sumber resmi pemerintah dan lembaga bereputasi untuk memastikan konsistensi, keabsahan, dan kredibilitas data. Validasi dilakukan melalui konfirmasi lintas sumber (*cross-source validation*) antara data APBD, laporan DJPK Kementerian Keuangan, dan BPS.

Hasil

Gambaran Umum Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah yang struktur pendapatannya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer fiskal nasional. Dalam konteks pasca pandemi COVID-19, dana transfer memiliki peran penting karena pemerintah daerah harus tetap menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik.

Struktur Pendapatan Daerah dan Tren Dana Transfer

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat dari perbandingan antara dana transfer, PAD, dan total pendapatan daerah. Data tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa dana transfer memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan PAD. Tabel 1 menyajikan data struktur pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur secara komprehensif.

Tabel 1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur (2022-2025)

Tahun	Total APBD/Pendapatan Daerah	Dana Transfer Fiskal	PAD	Keterangan
2022	± Rp2,8 triliun	> Rp2,4 triliun	± Rp440 miliar	Dana transfer menjadi sumber utama pendapatan daerah
2023	± Rp2,895 triliun	± Rp2,429 triliun	± Rp440,9 miliar	Dana transfer masih menjadi komponen penting pendapatan daerah
2024	± Rp3,320 triliun	± Rp2,732 triliun	± Rp547,9 miliar	Dana transfer meningkat dan PAD menunjukkan tren kenaikan
2025	± Rp3,2 triliun	± Rp2,73 triliun	> Rp500 miliar	Dana transfer meningkat dan tren kenaikan PAD berlanjut (*estimasi)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa dana transfer fiskal merupakan komponen dominan dalam struktur pendapatan Kabupaten Lombok Timur secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, dana transfer menyumbang lebih dari 85% total APBD, sementara PAD hanya sekitar 15,7%. Meskipun secara nominal PAD menunjukkan tren kenaikan—dari ±Rp440 miliar pada 2022 menjadi lebih dari Rp547 miliar pada 2024—proporsinya terhadap total pendapatan belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri dan masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat (Anggriawan et al., 2025).

Rasio Kemandirian dan Ketergantungan Fiskal Daerah

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Lombok Timur selama periode 2022–2024, beserta kategori dan implikasinya.

Tabel 2. Rasio Fiskal Kabupaten Lombok Timur (2022-2024)

Tahun	Rasio Kemandirian Fiskal (%)	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)	Kategori Kemandirian	Implikasi
2022	15,71%	85,71%	Sangat Rendah (<25%)	Sangat bergantung pada transfer pusat; PAD belum mampu membiayai kebutuhan daerah secara mandiri
2023	15,23%	83,93%	Sangat Rendah (<25%)	Ketergantungan fiskal tetap tinggi; stabilitas anggaran terjaga melalui transfer
2024	16,50%	82,29%	Sangat Rendah (<25%)	Tren kenaikan PAD positif; transfer masih dominan namun proporsinya mulai menurun

Berdasarkan Tabel 2, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Timur berada dalam kategori "Sangat Rendah" selama periode pengamatan, berkisar antara 15,23% hingga 16,50%. Artinya, kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik melalui PAD masih sangat terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat akibat terbatasnya kapasitas pendapatan asli daerah (Anggriawan et al., 2025). Sementara itu, rasio ketergantungan fiskal yang sangat tinggi (82–86%) menunjukkan bahwa dana transfer merupakan sumber utama pembiayaan daerah, sehingga apabila terjadi pengurangan alokasi dana transfer, kemampuan fiskal daerah dapat ikut terganggu.

Peran Dana Transfer Fiskal dalam Pelayanan Publik

Dana transfer fiskal tidak hanya memiliki peran dalam menjaga keseimbangan APBD, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan pelayanan publik. Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, tingginya kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa pembiayaan berbagai layanan publik masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Pasca pandemi COVID-19, kebutuhan pelayanan publik mengalami peningkatan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi PAD yang masih terbatas, dana transfer menjadi sumber pembiayaan penting agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dana transfer fiskal dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung ketahanan fiskal sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan publik. Tanpa dukungan dana

transfer, pemerintah daerah berpotensi menghadapi keterbatasan dalam membiayai program prioritas daerah.

Ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer juga perlu diantisipasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana transfer tidak hanya digunakan untuk belanja rutin, tetapi juga diarahkan pada program-program produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Dengan demikian, dana transfer dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan PAD dan penguatan kemandirian fiskal.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pasca pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2022, dana transfer mencapai lebih dari Rp2,4 triliun dari total APBD sekitar Rp2,8 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah atau PAD hanya sekitar Rp440 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer, sedangkan PAD belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan daerah.

Tingginya kontribusi dana transfer menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Timur masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat. Rasio ketergantungan fiskal sebesar 85,71% memperlihatkan bahwa dana transfer merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Sebaliknya, rasio kemandirian fiskal sebesar 15,71% menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui PAD masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat akibat terbatasnya kapasitas pendapatan asli daerah (Anggriawan, 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, dana transfer fiskal tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik. Dana transfer memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan pelayanan publik, membiayai program pembangunan, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Peran tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah tetap dituntut menjaga kualitas layanan dasar meskipun kapasitas PAD masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa transfer antarpemerintah memiliki peran penting dalam memengaruhi kapasitas fiskal dan respons belanja pemerintah daerah (Saptono & Mahmud, 2023).

Dana transfer fiskal juga berperan dalam menjaga stabilitas anggaran daerah. Ketika PAD belum mampu membiayai kebutuhan belanja daerah secara optimal, dana transfer menjadi penyangga utama agar fungsi pemerintahan tetap berjalan. Dalam konteks pasca pandemi, peran ini menjadi semakin penting karena pemerintah daerah harus tetap membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dana transfer dapat dipahami sebagai instrumen fiskal yang membantu pemerintah daerah menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas pembangunan daerah (Rahmasari, 2024).

Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer juga menunjukkan adanya tantangan dalam kemandirian fiskal daerah. Ketahanan fiskal daerah yang ideal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana transfer yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Apabila daerah terlalu bergantung pada dana transfer, maka stabilitas fiskalnya dapat menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, perubahan formula

alokasi transfer, atau pengurangan dana dari pemerintah pusat. Fenomena ini berkaitan dengan *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika belanja daerah lebih responsif terhadap dana transfer dibandingkan terhadap PAD (Fitrianti et al., 2025).

Kondisi Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa dana transfer memiliki peran ganda. Dalam jangka pendek, dana transfer menjadi penopang utama ketahanan fiskal daerah karena membantu membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap transfer dapat menghambat dorongan daerah untuk meningkatkan PAD secara mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat dapat menjadi stimulus terhadap pendapatan daerah, tetapi dampaknya sangat bergantung pada respons kebijakan fiskal pemerintah daerah (Saptono & Mahmud, 2023).

Rendahnya rasio kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Timur menunjukkan perlunya penguatan strategi peningkatan PAD. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan lokal melalui peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, penguatan sektor ekonomi lokal, dan digitalisasi administrasi pendapatan daerah. Upaya ini penting karena PAD merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Hasanah et al., 2025).

Selain peningkatan PAD, efektivitas penggunaan dana transfer juga perlu menjadi perhatian. Dana transfer sebaiknya tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin, tetapi juga diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Sektor produktif tersebut dapat meliputi pembangunan infrastruktur ekonomi, penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan layanan administrasi publik. Penggunaan dana transfer yang diarahkan pada sektor produktif dapat membantu memperluas basis ekonomi daerah dan meningkatkan potensi PAD pada masa mendatang. Penelitian mengenai hubungan PAD, dana transfer, kapasitas fiskal, dan belanja modal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memengaruhi kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembiayaan daerah (Yulsiati et al., 2025).

Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, peningkatan dana transfer perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana transfer tidak hanya menjadi sumber pembiayaan jangka pendek, tetapi juga menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi daerah. Jika dana transfer dikelola secara produktif, maka dana tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat potensi pendapatan daerah di masa depan. Dengan demikian, dana transfer dapat berfungsi sebagai instrumen transisi menuju kemandirian fiskal daerah (Saptono & Mahmud, 2023).

Dari sisi kebijakan publik, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun strategi fiskal yang lebih adaptif. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi belanja, penguatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Ketahanan fiskal daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan daerah memperoleh dana transfer, tetapi juga dari kemampuan daerah mengelola pendapatan dan belanja secara efektif. Penelitian mengenai kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa PAD, dana transfer, dan

kapasitas fiskal merupakan faktor penting dalam menjelaskan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah (Yulsiati et al., 2025).

Dengan demikian, dana transfer fiskal memiliki kontribusi penting dalam menopang ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pasca pandemi COVID-19. Dana transfer membantu menjaga stabilitas APBD, membiayai pelayanan publik, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Namun, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer juga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah ke depan perlu diarahkan pada dua strategi utama, yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer dan memperkuat PAD sebagai dasar kemandirian fiskal daerah (Hasanah et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran penting dalam jangka pendek sebagai penyangga fiskal daerah. Namun dalam jangka panjang, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui optimalisasi PAD dan penguatan sektor ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, dana transfer tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan daerah, tetapi juga dapat menjadi instrumen kebijakan publik untuk memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap (Fitrianti et al., 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dana transfer fiskal memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan fiskal Kabupaten Lombok Timur pasca pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif melalui rasio ketergantungan fiskal yang berkisar antara 82,29% hingga 85,71% selama periode 2022–2024, serta rasio kemandirian fiskal yang masih berada pada kategori "Sangat Rendah" dengan kisaran 15,23%–16,50%. Dana transfer yang mencapai lebih dari Rp2,4 triliun hingga Rp2,73 triliun per tahun menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah, sehingga mampu menjaga stabilitas APBD, mendukung keberlanjutan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial, serta membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu mempertahankan bahkan mengoptimalkan kebijakan transfer fiskal bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, terutama dalam fase pemulihan pasca krisis. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tingginya ketergantungan pada dana transfer mengisyaratkan perlunya strategi jangka menengah-panjang untuk memperkuat PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi administrasi pendapatan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan masih bersifat parsial untuk tahun 2025 sehingga analisis rasio lengkap hanya tersedia untuk tahun 2022–2024. Kedua, penelitian ini tidak menggunakan uji statistik inferensial sehingga tidak dapat menguji hubungan kausal secara formal. Ketiga, analisis hanya mencakup satu kabupaten, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar menggunakan data keuangan daerah yang lebih lengkap dalam bentuk runtut waktu (*time series*) periode 2019–2025 agar analisis ketahanan fiskal dapat dilakukan secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan uji statistik inferensial, seperti analisis regresi panel atau uji korelasi, untuk menguji hubungan antara dana transfer fiskal, PAD, belanja daerah, dan ketahanan fiskal secara lebih kuat.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Adelia, N., Choiriyah, N., Hanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis Pengelolaan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Di Kota Malang. *Journal Social Society*, 6(3), 1721–1742. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1355>
- Aini, E. N., Zuliasari, W., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Journal Social Society*, 6(3), 1654–1666. <https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1327>
- Anggriawan, T., Susilo, S., & Prasetyia, F. (2025). Does Indonesian Fiscal Decentralization Lead to Local-Central Fiscal Dependency? *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 11(1), 117–125. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.11>
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., & Hidayah, N. (2025). Flypaper effect: Analysis of financial transfers from the central government to provincial regions in Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 14(1), 54–64. [https://doi.org/10.21511/pmf.14\(1\).2025.05](https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.05)
- Hasanah, N., Masdar, R., & Furqan, A. C. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950–2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Indriani, I. K., Soraya, S., & Kurniasih, N. (2024). Resiliensi Anggaran Daerah: Indeks Anticipatory Capabilities, Coping Capabilities, dan Vulnerability. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 12, 406–420. <https://doi.org/10.31328/snav.v12i0.43>
- Jannah, A. N., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of COVID-19 Pandemic on Local Fiscal Revenue: Empirical Evidence from the Regions with Dominant Tertiary Sectors. *Economics and Finance in Indonesia*, 68(2), 109–126. <https://doi.org/10.47319/efi.v68i2.783>
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Nanga, M., & Runtuk, J. K. (2020). Dampak Transfer Fiskal Antar Tingkat Pemerintahan terhadap Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten dan Kota: Studi Kasus Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Transformatif Unkriswina Sumba*, 9(2), 97–104. <https://doi.org/10.56399/jtu.v9i2.142>
- OECD. (2020). COVID-19 and Fiscal Relations Across Levels of Government. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). <https://doi.org/10.1787/ab438b9f-en>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2022). DPRD Lotim Setujui RAPBD 2023. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. <https://portal.lomboktimurkab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2023). APBD 2024 Disahkan. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. <https://portal.lomboktimurkab.go.id>
- Rahmasari, T. F., Darmastuti, D., & Nurrahman, K. A. (2024). Local Finance and Regional Expenditures: Is There a Flypaper Effect in Indonesia? *KnE Social Sciences*, 9(20), 62–84. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i20.16474>

- Ratih, A., Fathilda, I. K., Maria, G. A. R., Nikmah, N. A., Tristiano, T., Sugianto, A., & Setiyanti, N. (2025). Benarkah Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Menurunkan Kualitas Pembangunan? *Jurnal Ekspos*, 3(2), 89–96. <https://doi.org/10.62376/je.v3i2.84>
- Saptono, P. B., & Mahmud, G. (2023). Stimulus or Enforcement? How Intergovernmental Transfers Crowd-in Local Taxes in Indonesia. *Public Finance Review*, 51(6), 782–837. <https://doi.org/10.1177/10911421231191961>
- Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local Expenditure Financing Response in Regencies and Municipalities in Indonesia: Analysis of the Flypaper Effect Phenomenon. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 1–17. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.23983>
- Smoke, P., Gomez-Alvarez, D., Miranda, A. M., & Radics, A. (2022). The Role of Subnational Governments in the COVID-19 Pandemic Response: Are There Opportunities for Intergovernmental Fiscal Reform in the Post-Pandemic World? *Inter-American Development Bank*. <https://doi.org/10.18235/0004391>
- Triyulianto, T., & Nurvita, B. S. R. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan. *Good Governance*, 20(2), 123–138. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807>
- World Bank. (2021). COVID-19's Impact on Sub-National Governments. *World Bank Group*. <https://doi.org/10.1596/35620>
- Yassa, S., & Bumbungan, B. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat. *Journal Social Society*, 1(1), 28–32. <https://doi.org/10.54065/jss.1.1.2021.52>
- Yulsiati, H., Sartika, I., & Febriantoko, J. (2025). The Influence of Own-Source Revenue, Transfer Funds, Regional Fiscal Capacity, and Capital Expenditure on Regional Loans. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(2), 380–388. <https://doi.org/10.38142/jogta.v4i2.1658>